



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
KELOMPOK	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	DL
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	



- b. bahwa dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergitas rencana kerja pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah pusat. ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011– 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2012-2017.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2012-2017.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012- 2017.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2016.

- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Hubungan Antar Dokumen
- D. Sistematika Penyusunan
- E. Maksud Dan Tujuan

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 1) Aspek Geografi Dan Demografi
 - 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 3) Aspek Daya Saing Daerah
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

C. Permasalahan Pembangunan Daerah

- 1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- 2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

- 1) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 2016
- 2) Tantangan dan Prospek perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

- 1) Arah Kebijakan Keuangan
- 2) Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan.

C. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Arah Kebijakan pendapatan Daerah
- 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah
- 3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

A. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

B. Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 5

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Renja SKPD sebagai bahan masukan.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagai dasar bagi SKPD untuk Penetapan Renja SKPD.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal Mei 2016


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR)